

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Ada beberapa alasan yang mendasari penulis memilih judul sikap pemerintah Cina terhadap muslim Uighur paska tragedi WTC (World Trade Center) 11 September 2001. Pertama, fenomena yang akhir-akhir ini menarik perhatian masyarakat internasional adalah mengenai perang global melawan terorisme internasional. Dalam perang melawan terorisme itu, umat islamlah yang terkena dampaknya paling besar. Atas nama perang melawan terorisme internasional, oleh beberapa negara besar dimanfaatkan sebagai dalih membenaran untuk memerangi gerakan separatis di wilayahnya.

Kedua, fokus kajian tentang sikap pemerintah Cina yang semakin represif kepada muslim Uighur di Xinjiang paska tragedi 11 September 2001. Sikap pemerintah Cina tersebut dilakukan untuk menghalangi keinginan muslim Uighur untuk merdeka dan mendirikan negara Islam Turkistan Timur. Selain itu didasarkan kepada kepentingan nasional Cina.

Ketiga, usaha-usaha yang dilakukan muslim Uighur untuk merdeka, karena selama ini pemerintah Cina selalu menghalangi keinginan muslim Uighur untuk merdeka, menjadi dinamika menarik dalam perjalanan sejarah Cina dan muslim Uighur di Xinjiang. Hal ini akan menjadi gambaran umum

B. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tema yang diajukan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan sikap pemerintah Cina semakin represif terhadap muslim Uighur paska tragedi 11 September 2001, dalam menghalangi keinginan muslim Uighur untuk merdeka dari Cina.
2. Untuk mengidentifikasi alasan pemerintah Cina semakin represif terhadap muslim Uighur paska tragedi 11 September 2001.

C. Latar Belakang Masalah

Republik Rakyat Cina merupakan negara di kawasan Asia Timur yang memiliki penduduk terbesar di dunia dan salah satu negara yang memiliki wilayah terluas. Cina memiliki luas wilayah 9.596.960 km² yang berbatasan langsung dengan Rusia, Mongolia, Korea Utara di sebelah utara; Pakistan, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgistan, Kazakhstan di sebelah barat; India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos, Vietnam di sebelah selatan dan Samudera Pasifik di sebelah timur.¹(lampiran 1)

Republik Rakyat Cina secara resmi diproklamasikan pada tanggal 1 Oktober 1949, setelah partai Komunis Cina (Kuchantang), di bawah pimpinan Mao Zedong berhasil mengalahkan kaum nasionalis (Kuomintang). Maka sejak itu para pemimpin komunis memainkan peranan sangat penting

dalam kehidupan politik di RRC hingga dewasa ini.² Penduduk Cina saat ini berjumlah 1.298.847.624 (2004) yang terdiri dari berbagai macam etnis.³

Republik Rakyat Cina merupakan negara komunis terbesar di Asia pada saat ini, sejak runtuhnya Uni Soviet. Akan tetapi, tidak dapat disangkal bahwa Uni Soviet mempunyai pengaruh kuat dalam politik kaum komunis Cina selama setengah abad. Pengaruh komunisme Soviet, melalui penyebaran Marxisme-Leninisme, menjadi bagian integral dari komunisme Cina.⁴

Meskipun sebagai negara komunis, penyebaran Islam di Asia Timur paling terlihat di daratan Cina. Masyarakat Islam tinggal merata di seluruh Cina, terutama dibagian barat laut Cina yaitu propinsi Gansu, Qinghai, Shanxi, wilayah autonomi Xinjiang dan wilayah autonomi Ningxia, dan Yunan di daerah barat daya.⁵

Etnis Han merupakan etnis penduduk asli Cina yang memiliki jumlah terbesar. Sedangkan Etnis Uighur merupakan kelompok muslim yang berada di propinsi Xinjiang, terbesar kedua setelah etnis Hui. Xinjiang merupakan sebutan yang diberikan oleh Cina karena sebelumnya wilayah ini bernama Turkistan Timur (East Turkistan).

Hubungan Cina dengan Xinjiang mengalami pasang surut. Dari kenyataan sejarah yang ada, Cina dan Xinjiang pernah memiliki hubungan baik di masa lampau, namun di dalam hubungan itu mulai terjadi ketegangan

² Dini Masitoh, *Cina Masa Pertengahan dan Moderen: Sejarah Singkat dan Perkembangan Masyarakat Cina, Al-Turas (Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya dan Agama) Vol. 2 No. 2*, Jakarta, Juli 2002, hal. 145.

³ <http://www.infoplease.com/atlas/country/china.html>, diakses 12 Desember 2004.

⁴ Mohtar Mas' oed dan Colin MacAndrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000, hal. 176-177.

⁵ *Sejarah Islam Di Cina*, <http://www.iaic.org/>, diakses 12 Desember 2004.

dan konflik. Tahun 1759 dinasti Ching mulai menguasai Xinjiang, saat itu masih bernama Turkistan Timur yang sebelumnya telah dikuasai dinasti Yuan (Mongol) pada abad ke-13.

Pada tahun 1944-1949 wilayah Xinjiang untuk pertama kalinya berhasil memproklamasikan kemerdekaannya dan mendirikan negara Islam Turkistan Timur. Namun itu tidak berlangsung lama, setelah terjadi revolusi pimpinan Mao Zedong, pemerintahan komunis Cina tahun 1949 kembali berhasil menaklukkan Turkistan Timur. Bersamaan dengan itu, tahun 1950 puluhan ribu bangsa Han bermigrasi ke propinsi Xinjiang dalam rangka mengukuhkan kekuasaan pemerintah komunis Cina dan mengurangi pengaruh suku-suku minoritas yang ada.⁶

Maka sejak itu situasi di Xinjiang menjadi kacau. Sikap pemerintah terhadap muslim di Cina terutama Muslim Uighur di Xinjiang seringkali berubah-ubah. Muslim Uighur merasa campur tangan pemerintah Cina terlalu jauh, pemerintah seringkali melakukan penindasan dan berbuat sewenang-wenang baik secara politik maupun agama. Dengan sikap pemerintah Cina tersebut, seringkali dinilai merugikan eksistensi muslim Uighur.

Sejak Deng Xiaoping memimpin, dengan mengadakan program "Reformasi dan Keterbukaan" tahun 1978, pemerintah Cina mulai membuka pintu untuk semua agama di negaranya, sehingga umat beragama di Cina khususnya umat Islam menikmati kebebasan beragama. Dengan adanya ini hubungan antara pemerintah Cina dengan minoritas muslim terutama muslim

⁶ Z. A. Maulani, *Orisi Xinjiang*, www.kemling.edu, diakses 12 Mei 2004

Uighur terjalin baik. Muslim Uighur diperbolehkan mengekspresikan identitas budayanya dan penggunaan bahasa Uighur, madrasah-madrasah, masjid-masjid yang ditutup saat terjadinya revolusi kebudayaan dibuka kembali. Bahkan pemerintah memberikan dana bantuan untuk mendirikan kembali bangunan masjid yang dihancurkan pada masa itu.

Umat Islam diperbolehkan untuk memeluk kepercayaannya masing-masing, buku dan literatur Islam diperbolehkan dicetak dalam bahasa Arab dan Cina, yang kemudian disebarakan sampai ke perbatasan Cina. Kekangan terhadap kehidupan beragama mulai longgar walaupun tidak sepenuhnya, tetapi setidaknya umat Islam di Cina, terutama muslim Uighur di Xinjiang dapat merasa lega. Mereka tidak perlu merasa takut dalam menjalankan kegiatan keagamaan. Akan tetapi pada pelaksanaannya pemerintah Cina tetap melakukan tekanan serta tindakan kekerasan terhadap muslim Uighur.

Beberapa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Cina, diantaranya kebijakan asimilasi, mengirim ribuan etnis Han ke Xinjiang. Muslim Uighur semula etnis mayoritas di wilayah Xinjiang, namun semakin terdesak dengan keberadaan etnis Han yang semakin lama bertambah banyak jumlahnya, sehingga muslim Uighur menjadi etnis minoritas dan warga kedua di wilayahnya sendiri. Selain itu pemerintah Cina juga mengeluarkan berbagai kebijakan diantaranya mengenai kontrol kelahiran, uji coba senjata nuklir di Lop Nor dan mengeksploitasi sumber daya alam di Xinjiang.⁷

⁷ Michael Dillon, *The Historical Context of Minority Rights Cases*, International Journal of Law and Human Rights, No. 1, 2003, p. 1.

Meski ada jaminan kebebasan beragama, seperti dalam Konstitusi Republik Rakyat Cina disebutkan setiap warga negara memiliki kebebasan dalam hal beragama. Tak seorang pun atau organisasi mana pun yang bisa memaksa untuk percaya atau tidak percaya pada satu keyakinan. Tanpa memandang keyakinan mereka, setiap warganegara harus diperlakukan setara di dalam negara.⁸

Namun pada pelaksanaannya praktek agama tetap mendapat campur tangan dan pengawasan ketat dari pemerintah Cina terhadap berbagai kegiatan keagamaan muslim Uighur di Xinjiang. Diantaranya dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan resmi yang melucuti agama dan membatasi kegiatan keagamaan di Xinjiang. Misal, peraturan yang mengendalikan pertemuan keagamaan di Xinjiang, dikeluarkan tanggal 9 November 1988. Peraturan ini menjadi cikal bakal yang membatasi kegiatan keagamaan di masjid dan madrasah secara politis.

Dalam pelanggaran hak asasi manusia, sejak terjadinya kerusuhan yang dilakukan muslim Uighur di Xinjiang, pemerintah Cina sepanjang tahun 1990-an menempati posisi tertinggi dalam angka memberikan hukuman mati dan eksekusi.⁹ Melalui kebijakan "Strike Hard" tahun 1997, pasukan militer Cina menembaki puluhan atau ratusan warga muslim hingga tewas, serta menahan sekitar seribu muslim Uighur di Xinjiang karena turun ke jalan untuk beragam alasan, dari memprotes penggerebakan pengajian sampai menuntut

⁸ Teguh Setiawan dan Sri Budi Eko Wardani, ed., *op. cit.*, hal. 97.

⁹ *Republika*, 26 Agustus 1997.

kemerdekaan Xinjiang dari pemerintah RRC.¹⁰ Dalam kebijakan “Strike Hard” tahun 1997 pemerintah Cina menuduh muslim Uighur di Xinjiang sebagai separatis, dan ekstremis agama.

Pelanggaran HAM di Xinjiang terhadap muslim Uighur, semakin meningkat sejak dikeluarkan kembali kebijakan “Strike Hard” pada bulan April 2001, dampak dari kebijakan tersebut terjadi penangkapan, penahanan, dan pemberian hukuman mati kepada sekitar 100.000 muslim Uighur, dan banyak diantara mereka yang ditangkap atas alasan politik.

Sejak paska tragedi 11 September 2001, Amerika Serikat melancarkan perang global melawan terorisme internasional. Dampak dari pernyataan tersebut, perang melawan terorisme internasional sering dimanfaatkan oleh beberapa negara besar sebagai dalih pembenaran untuk memerangi gerakan separatis di wilayahnya. Demam terorisme nampaknya tidak hanya melanda negara Barat dan Eropa. Cina, yang selama ini dikenal sebagai pusat peradaban komunis, belakangan ikut-ikutan tanpa sebab 'memburu' kelompok Islam dengan mengkait-kaitkan dengan tuduhan teror.¹¹

Akibat peristiwa tersebut, pelanggaran HAM di Xinjiang semakin meningkat. Dengan mengatasnamakan perang global melawan terorisme internasional, pemerintah Cina menambah kebijakan-kebijakan yang semakin menekan dan menindak keras kepada gerakan kemerdekaan muslim Uighur. Hanya berjarak satu pekan paska tragedi tersebut, pemerintah Cina mengadakan pertemuan di biro keamanan publik di Xinjiang, diumumkan

¹⁰ Cina Tutup Kota Kecil Yining Karena Kerusakan Separatis Etnis Uighur, *Republika*, 12 Februari 1997.

¹¹ Cina Tutup Kota Kecil Yining Karena Kerusakan Separatis Etnis Uighur, *Republika*, 12 Februari 1997.

untuk semakin meningkatkan kebijakan "Strike Hard" yang telah dimulai kembali pada bulan April lalu dan bagian keamanan diperintahkan untuk mematuhi perintah pemerintah Cina "tangkap dulu baru tuntutan".¹²

Pada tanggal 14 November 2001, saat konferensi pers juru bicara departemen Luar Negeri Cina, menyampaikan bukti-bukti kejahatan yang pernah dilakukan teroris Uighur selama 10 tahun terakhir, yaitu peristiwa Baren tahun 1990, peristiwa Yining tahun 1997, dan aksi protes damai di Khotan tahun 1999. serta sejumlah kejahatan-kejahatan kriminal termasuk pengeboman, ledakan-ledakan tidak disengaja dan kasus-kasus kriminal seperti pembunuhan. Semua itu dituduhkan kepada gerakan separatis Turkistan Timur tanpa adanya bukti-bukti.¹³

Padahal menurut laporan Amnesti Internasional menyatakan hampir tidak ada tindakan teroris dilakukan di Xinjiang dalam beberapa tahun terakhir ini. Namun pemerintah Cina telah menangkap ribuan orang dalam enam bulan terakhir, dan memberlakukan batasan ketat terhadap hak-hak kebebasan agama dan budaya.¹⁴ Sedangkan menurut pimpinan ETIC, Dilixat Raxit, sebagian mayoritas muslim Uighur hanya menginginkan otonomi yang lebih luas dari pemerintah Cina dan diperbolehkan untuk membuat keputusan sendiri di wilayah mereka, dan mereka tidak meminta kemerdekaan penuh. Selain itu muslim Uighur hanya menginginkan perlindungan dari pelanggaran HAM dan diskriminasi.

¹² Situation with Human Right in East Turkistan after September 11thEvents, www.uygur.org, diakses 31 Agustus 2004.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Koran Tempo*, 23 Maret 2002.

Namun pemerintah Cina semakin memperketat kontrol terhadap muslim Uighur di Xinjiang, menahan orang-orang yang dituduh sebagai teroris, melarang berpuasa selama bulan Ramadhan dan menambah berbagai hambatan untuk membatasi kegiatan beribadah umat Islam selama bulan Ramadhan, mengendalikan dan menangkap para pemuka agama, dan melarang muslim Uighur di Xinjiang untuk pergi haji.

Menurut Amnesti Internasional yang dikutip dari sumber-sumber resmi, sampai akhir 2001, ada 8000 imam dididik untuk mendapatkan gambaran mengenai kebijakan partai komunis terhadap agama apapun di Cina.¹⁵ Misal, pemerintah melakukan kontrol yang ketat terhadap para pemberi khutbah di masjid-masjid, dan menentukan secara langsung siapa yang menjadi imam masjid di Turkistan Timur.¹⁶

Selama bulan Ramadhan, pemerintah Cina memerintahkan muslim di Xinjiang dilarang melakukan aktivitas beribadah. Seperti wanita muslim Uighur yang bekerja di kantor pemerintahan tidak diperbolehkan memakai jilbab selama bekerja, anak-anak sekolah dan pejabat dilarang melaksanakan ibadah puasa selama ramadhan, dan pemerintah Cina menolak meliburkan sekolah selama Ramadhan.

Sejak itulah, ribuan muslim Uighur di Xinjiang semakin menderita akibat teror, penangkapan dan penyiksaan yang dilakukan pemerintah Cina. Menurut lembaga muslim Turkistan Timur, dalam waktu 2 bulan paska tragedi tersebut, pemerintah Cina telah menangkapi 3000 muslim Uighur dan Banyak

¹⁵ Cina Menindas Muslim Xinjiang, *Republika*, 23 Maret 2002.

¹⁶ Harun O. Bulut, *Beberapa Tragedi WTC, Cina, Terorisme, 2000, Muslim, Xin, Turki*

ulama yang ditangkap dengan tuduhan melakukan integrasi dari pemerintah Cina, melakukan kegiatan agama ilegal, dan dicurigai sebagai terorisme. Bahkan beberapa diantara mereka dipenjara dalam waktu cukup lama dan dijatuhi hukuman mati tanpa adanya bukti.

Tahun 2002, pemerintah Cina mengeluarkan dokumen pertahanan *China's National Defense in 2002*. Dokumen tersebut mengatakan terorisme sebagai masalah keamanan nomor satu. Secara khusus, dokumen itu menunjuk pada wilayah bermasalah Xinjiang.¹⁷ Sejak itulah pemerintah Cina memberikan label teroris kepada sejumlah kelompok Islam, tokoh Islam dan muslim Uighur di Xinjiang yang melawan pemerintah Cina.

Pada Tanggal 15 Desember 2003, untuk pertama kalinya pemerintah Cina mengeluarkan daftar 4 kelompok Islam dan 11 orang muslim Uighur yang dicurigai sebagai teroris. Mereka dicurigai telah merencanakan, mengorganisasi, dan melakukan serangkaian kegiatan terorisme, seperti pengeboman, pembunuhan, pembakaran rumah, dan serangkaian serangan di Xinjiang dan wilayah Cina lainnya.¹⁸ Kelompok Islam yang dicurigai sebagai teroris, diantaranya Organisasi Pembebas Turkistan Timur (ETLO), Dewan Pemuda Internasional Uighur (WUYC), Gerakan Islam Turkistan Timur (ETIM), dan Pusat Informasi Turkistan Timur (ETIC).

Dalam melakukan semua tindakan kekerasan untuk memerangi terorisme di negaranya, pemerintah Cina mengharapkan dukungan dari masyarakat internasional. Dengan cara mengingatkan negara lain akan bahaya

¹⁷ Teror Menjadi Ancaman Keamanan Baru Bagi Cina, *Media Indonesia* 10 Desember 2002

¹⁸ *China Daily*

kelompok ini, pemerintah Cina juga menghimbau kepada negara lain untuk bertindak keras, tidak mendukung, melindungi, membekukan aset kekayaan, menghukum serta mengirim mereka yang terlibat kembali kepada Cina.

Perang sporadis yang pernah dilakukan oleh muslim Uighur untuk memaksa pemerintah Cina berunding mengalami kegagalan. Maka sejak saat ini, untuk menghadapi penindasan dan perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah Cina, muslim Uighur melakukan dengan cara damai dan tanpa kekerasan. Namun dengan mengatasnamakan perang global melawan terorisme internasional, sikap pemerintah Cina kepada muslim Uighur di Xinjiang semakin represif.

D. Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka permasalahan yang muncul adalah:

“Mengapa pemerintah Cina semakin represif terhadap muslim Uighur di Xinjiang paska tragedi 11 September 2001?”

E. Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan tema yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini, kerangka pemikiran yang digunakan adalah

1. Konsep Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar serta faktor yang paling menentukan para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar

negeri. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton kepentingan nasional diasumsikan sebagai:

Kepentingan nasional merupakan konsepsi yang sangat umum tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut mencakup kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi.¹⁹

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Kepentingan nasional dalam pengertian yang spesifik, berarti kelangsungan hidup (*survival*), yaitu negara bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorial (identitas fisik), mempertahankan rezim ekonomi-politiknya (identitas politik), serta memelihara norma-norma etnis, religius, linguistik, dan sejarah (identitas kultural).²⁰

Jadi menurut pengertian di atas unsur kepentingan nasional mencakup keutuhan wilayah (integritas teritorial), keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi. Sehingga dari unsur tersebut suatu negara bisa menurunkan kebijaksanaan-kebijaksanaan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik.²¹

Sejak pemerintah komunis Cina berhasil menguasai kembali wilayah Xinjiang (Turkistan Timur), keadaan muslim Uighur di Xinjiang kerap

¹⁹ Jack C. Plano and Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional* (terj. Wawan Juanda), Putra A Bardin, 1999, hal. 7.

²⁰

mengalami tindakan kekerasan dan penindasan sewenang-wenang dari pemerintah Cina. Misal, pada tahun 1950, untuk pertama kalinya pemerintah Cina mengeluarkan kebijakan asimilasi, diantaranya mengirim puluhan ribu etnis Han ke wilayah Xinjiang dalam rangka mengukuhkan kekuasaannya dan mengurangi pengaruh suku-suku minoritas yang ada.

Akibat kebijakan tersebut pemerintah komunis Cina mendapatkan perlawanan dari muslim Uighur, yang menginginkan kemerdekaan dari Cina dan mendirikan negara Islam Turkistan Timur. Upaya muslim Uighur tersebut oleh pemerintah Cina dianggap sebagai ancaman. Karena apabila muslim Uighur melakukan pemberontakan melawan pemerintah Cina dan pemerintah Cina memberikan kemerdekaan kepada wilayah Xinjiang, pemerintah Cina mengkhawatirkan wilayah yang berbatasan langsung dan sedang bersengketa dengan pemerintah Cina akan melakukan tindakan yang sama. Karena jika hal tersebut terjadi maka keutuhan wilayah Cina akan terancam.

Selain itu Xinjiang merupakan wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam sangat banyak, berupa mineral murni, batubara, minyak, dan gas. Semua sumber daya alam tersebut, merupakan sumber kesejahteraan ekonomi bagi Cina. Karena keberhasilan pembangunan ekonomi Cina dalam beberapa dekade terakhir ini, 56% merupakan kontribusi dari wilayah Xinjiang.²² Sehingga pemerintah Cina tidak akan membiarkan wilayah Xinjiang terlepas dari Cina. Karena Cina akan mengalami kerugian yang besar di bidang ekonomi.

Wilayah Xinjiang merupakan wilayah sangat strategis dan berbatasan langsung dengan Asia Tengah, Afganistan, dan Pakistan, sehingga ancaman terorisme merupakan sumber abadi bagi Cina.²³ Maka sejak Amerika Serikat menyatakan perang global melawan teroris internasional, dan Afghanistan dituduh sebagai sarang teroris, karena telah melindungi Usamah bin Laden pimpinan Al-Qaidah. Pemerintah Cina menjadi khawatir, jika seluruh wilayah taklukan Cina yang berbatasan langsung dengan Afghanistan, khususnya Xinjiang akan berubah menjadi wilayah tidak stabil.

Seperti dikutip dalam artikel terjemahan dalam surat kabar berbahasa Uighur "The Urumchi Evening", tanggal 23 November 2001, presiden Jiang Zemin mengatakan "Unsur-unsur teroris Turkistan merupakan bagian dari terorisme internasional. Selama beberapa tahun yang lalu kekuatan teroris memperkuat gerakan separatis Turkistan Timur internasional. Unsur ini secara terus-menerus memperkuat gerakan separatis mereka yang diarahkan ke negara kami wilayah Xinjiang. Kekuatan ini, menjadi semakin agresif, dengan separatis mereka, pengrusakkan, dan tindakan teroris mengancam stabilitas sosial dan kesatuan nasional Xinjiang. Sehingga, kekuatan teroris ini telah mengancam integritas nasional dan kedaulatan negara."²⁴

Selain itu tidak dapat dipungkiri, bahwa banyak muslim Uighur di Xinjiang, ikut berjihad di Afghanistan di bawah bendera Taliban.²⁵ Menurut

²³ L. K. Choudhary, Islamic Militancy And Terrorism In Xinjiang: China's Anxieties And Concerns, *India Quaterly (A Journal Of International Affairs)* Vol.58/2, April-Juni 2002, hal. 69.

²⁴ "East Turkestan" Elements Threatening the Security of China, www.radicalparty.org, diakses 11 September 2004.

²⁵ Anne Meijdam, Dilema Cina: Mendukung Atau Menentang Aksi Militer AS Di Afghanistan, www.rmw.nl, diakses 2 Mei 2004.

2. Teori Persepsi

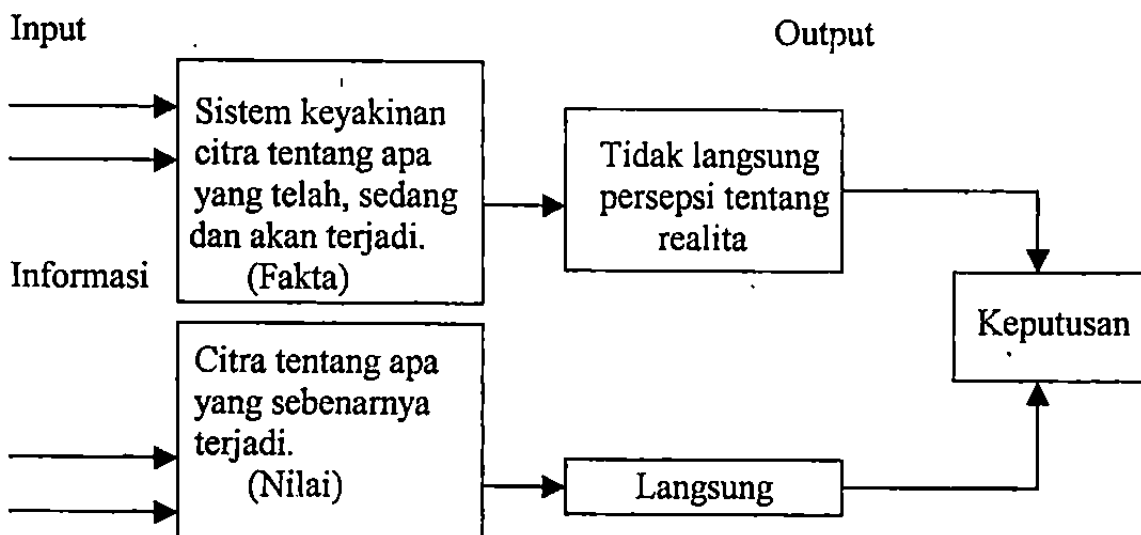
Teori ini digunakan untuk menganalisa sikap pemerintah yang semakin represif terhadap muslim Uighur di Xinjiang paska tragedi WTC, dilihat dari sudut pandang pemerintah Cina. Seseorang atau suatu pihak mengambil, memutuskan, dan melakukan tindakan berdasarkan pada apa yang mereka ketahui atau dengan kata lain sikap suatu pihak dipengaruhi oleh persepsinya masing-masing.

Dalam pengertian umum persepsi diartikan sebagai “Cara pandang seseorang dalam memandang orang lain yang didasarkan oleh pengetahuan dan informasi serta fakta-fakta yang dimiliki seseorang”. Walaupun mungkin salah, persepsi itu memainkan peran dalam menentukan perilaku suatu negara. Satu hal yang sangat terkait dengan persepsi adalah citra (*image*) yang menjadi pegangan seseorang atau sekelompok orang. Persepsi atau citra ini pada dasarnya bersifat dinamis, tidak permanen. Sehingga persepsi dapat saja berubah, tergantung dari bagaimana cara pandang seseorang tersebut dalam menanggapi suatu situasi berdasarkan kenyataan yang ada, jadi seseorang melakukan tindakan berdasarkan apa yang mereka ketahui dan yakini.

Teoritis sistem perseptual menurut Jones, membedakan tiga komponen persepsi, yaitu fakta, nilai, dan sistem keyakinan. Fakta adalah citra yang telah, sedang dan akan terjadi. Nilai merupakan preferensi terhadap pernyataan realitas tertentu dibanding realitas lain yang memberikan harga relatif kepada obyek dan kondisi. Karena itu, nilai tidak mengacu pada yang ada melainkan apa yang seharusnya ada. Sedangkan keyakinan adalah benar

terbukti, atau telah diketahui yang didasarkan pada penerimaan informasi yang sebelumnya dari lingkungan, meskipun hal itu tidak sama dengan data itu sendiri.²⁸ Sistem keyakinan terdiri dari serangkaian citra yang membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang seseorang.

Untuk lebih menjelaskan teori persepsi tersebut, Ole Holsti yang dikutip Mohtar Mas'ood, menggambarkan persepsi dan kebijakan luar negeri suatu negara sebagai berikut:



Sumber: Mohtar Mas'ood, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Analisis Dan Teorisasi*, PAU-UGM, Yogyakarta, 1989.

Dari diagram tersebut terlihat, bahwa nilai yang diyakini seseorang membantunya dalam menginterpretasikan informasi-informasi yang masuk. Mula-mula nilai yang dimiliki oleh suatu negara akan dikorelasikan dengan fakta yang ada, kemudian hasil dari sinergisitas kedua unsur tersebut akan menghasilkan suatu persepsi yang akan dituangkan dalam kebijakan negara. Suatu negara akan menyerap nilai-nilai yang ada pada masyarakat dan juga

²⁸ Walter S. Jones, *Landas Hubungan Internasional I: Perspektif Nasional*, PT Gramedia, Duta

persepsi suatu negara terhadap suatu masalah biasanya akan berbeda-beda karena nilai yang mereka kandung itupun berbeda-beda. Negara juga adalah aktor rasional yang perlu melihat kenyataan atau fakta sebelum membuat suatu kebijakan, walaupun pada kenyataannya kebijakan negara kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Hal ini diakibatkan karena pada kenyataannya negara tidak memandang dengan obyektif terhadap fenomena yang terjadi di dunia, karena yang lebih memainkan peranan yang penting dalam hal ini persepsi yang telah dimiliki negara, bukan kenyataan dunia itu.

Sikap pemerintah Cina yang semakin represif terhadap muslim Uighur di Xinjiang paska tragedi WTC, dilihat dari sudut pandang pemerintah Cina menilai bahwa sejak dulu muslim Uighur di Xinjiang serba negatif. Fakta yang ada bahwa keinginan untuk merdeka dan mendirikan negara Islam Turkistan Timur bagi muslim Uighur selalu dianggap mengancam, ekstrim, penuh teror dan menakutkan bagi negara Cina. Karena pemerintah Cina menuduh muslim Uighur telah merencanakan, mengorganisasi, dan melakukan sejumlah aksi kekerasan, seperti pengeboman, pembunuhan, pembakaran, meracuni, dan melakukan pemberontakan di wilayah Xinjiang, wilayah Cina lainnya, dan beberapa tempat di kawasan Asia Tengah untuk mewujudkan tujuannya.

Sejak Turkistan Timur dikuasai Cina tahun 1949, muslim Uighur beberapa kali telah melakukan perlawanan. Misal, tahun 1997 berbagai kerusuhan disertai kekerasan terjadi di Xinjiang. Februari 1997 ribuan muslim

Uighur melakukan demonstrasi di Yining. Demonstrasi itu disusul dengan tiga serangan bom terhadap bus yang mengambil korban lima orang tewas dan beberapa luka-luka.²⁹

Sejak tragedi 11 September 2001 teroris menyerang Amerika Serikat, menteri Keamanan Negara Cina, mengadakan konferensi pers telah mengidentifikasi orang yang dicurigai merencanakan memisahkan wilayah Xinjiang dari Cina. Selain itu menteri itu telah menemukan orang yang dicurigai merencanakan pengeboman gedung pemerintahan, meracuni taman kanak-kanak, merusak pipa minyak dan rel kereta api, dan membunuh orang. Kebanyakan kegiatan itu telah direncanakan oleh muslim Uighur di Xinjiang³⁰

Sementara ada nilai-nilai dari pemerintah Cina yang menyatakan bahwa unsur-unsur kekuatan teroris Turkistan Timur telah menjadi bagian dari terorisme internasional dan harus diberantas dan dimusnahkan. Karena selama beberapa tahun yang lalu terorisme internasional telah memperkuat gerakan separatis Turkistan Timur untuk melakukan pemberontakan. Pernyataan ini dikeluarkan setelah pertemuan Jiang Zemin dengan Vladimir Putin pada tanggal 20 Oktober 2001.³¹

Paska tragedi WTC, hal tersebut semakin menambah persepsi negatif Cina terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Pemerintah Cina selalu mengaitkan segala gerakan separatis muslim Uighur untuk merdeka dan mendirikan negara Islam Turkistan Timur sebagai kegiatan terorisme dan mempunyai

²⁹ <http://www.hamline.edu/apakabar/basisdata/1997/04/24/0010.html>, diakses 12 Mei 2004.

³⁰ http://www.uygur.org/wunn03/2003_12_15e.htm, diakses 12 Januari 2005.

³¹ "East Turkestan" Elements Threatening the Security of China, www.podjournal.org, diakses

hubungan dengan jaringan Al-Qaidah pimpinan Osama bin Laden. Namun hal ini tidak terjadi pada etnis muslim Hui. Seperti dikutip dari pernyataan juru bicara Deplu, Zhang Qiyue, "selama ini tidak ada kecurigaan pemerintah Cina kepada etnis muslim Hui. Berbeda dengan muslim Uighur di Xinjiang, pemerintah Cina sering bersikap represif terhadap mereka. Karena pemerintah Cina menganggap etnis muslim Uighur terus memendam keinginan untuk memisahkan diri dari negara Cina sedangkan etnis muslim Hui telah berasimilasi dengan etnis Cina lainnya.³²

Sementara itu pemerintah Cina memiliki sistem keyakinan yaitu sistem komunis, namun pemerintah Cina menggunakan pengalaman masa lalu untuk membenarkan sikap represif mereka terhadap muslim Uighur di Xinjiang. Pakar Xinjiang dari Departemen Studi Eurasia Tengah, Dr. Gardner Bovington, mengatakan, "Menurut laporan analisis politik di Cina, Mereka merasa di tahun 1980an dan 1990an ketika praktik keagamaan masih bebas di wilayah Xinjiang, pada saat bersamaan, terjadi gangguan politik yang sangat besar. Sebaliknya dengan apa yang terjadi tahun 1990an, ketika pemerintah menekan kebebasan beragama, kondisi mulai tenang, terutama setelah tahun 1997. Karena itu, sepertinya mereka mengacu pada pengalaman itu. Mereka sudah memberikan kebebasan beragama dan hasilnya adalah gejolak politik".³³

Dari penjelasan teori di atas, dapat dilihat persepsi Cina yang menilai bahwa sejak dulu muslim Uighur di Xinjiang serba negatif. Persepsi Cina

³² <http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/1204/22/0801.htm> diakses 10 Januari 2005

³³ " "

Dari penjelasan teori di atas, dapat dilihat persepsi Cina yang menilai bahwa sejak dulu muslim Uighur di Xinjiang serba negatif. Persepsi Cina yang negatif terhadap muslim Uighur di Xinjiang disebabkan, segala kegiatan yang dilakukan muslim Uighur untuk mencapai tujuannya selalu dianggap mengancam, ekstrim, penuh teror dan menakutkan bagi Cina.

Paska tragedi 11 September 2001, Amerika Serikat menyatakan perang global melawan terorisme internasional. Hal tersebut menambah persepsi negatif Cina terhadap muslim Uighur di Xinjiang, dengan mengaitkan segala kegiatan separatis muslim Uighur sebagai kelompok teroris dan mempunyai hubungan dengan jaringan terorisme internasional Al-Qaidah, pimpinan Osama bin Laden. Sehingga pemerintah Cina dengan mengatasnamakan perang global melawan terorisme internasional, bersikap semakin represif terhadap muslim Uighur di Xinjiang.

F. Hipotesa

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran diatas maka dapat diambil hipotesa bahwa sikap pemerintah Cina semakin represif terhadap muslim Uighur di Xinjiang paska tragedi WTC karena letak wilayah Xinjiang yang berbatasan langsung dengan Afghanistan membuat pemerintah Cina khawatir akan mengancam kepentingan nasional negaranya. Hal tersebut dikarenakan diduga keinginan muslim Uighur untuk merdeka mendapatkan bantuan dan mempunyai hubungan dengan jaringan terorisme internasional, Al-Qaidah pimpinan Osama bin Laden.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penelitian dan supaya data yang dikumpulkan tetap relevan dengan permasalahan, maka pembahasan ini dimulai pada tahun tahun 1978 sampai dengan 2003. Tetapi tidak tertutup kemungkinan kejadian di waktu lain sepanjang masih relevan dengan penelitian.

Dengan pertimbangan bahwa tahun 1978, merupakan tahun dimana pemerintahan Deng Xiaoping melalui program Reformasi dan Keterbukaan, pemerintah Cina memberikan sedikit kebebasan beragama terhadap muslim di Cina khususnya muslim Uighur di Xinjiang. Sedangkan tahun 2003, paska tragedi 11 September 2001, sikap pemerintah Cina semakin represif terhadap muslim di Cina khususnya muslim Uighur di Xinjiang.

H. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode studi pustaka, yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang berasal dari buku, majalah, surat kabar, karya ilmiah, jurnal, serta internet. Data tersebut diolah sebagai bahan pendukung hipotesa penulis, yang sesuai dengan keakuratan data dan fakta yang ada.

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan dan dijabarkan lebih rinci ke dalam sub-sub bab.

Bab 1 membahas tentang latar belakang, dengan menggunakan definisi, kerangka

erat, yang pada akhirnya nanti akan membentuk karya tulis runtut dan sistematis. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan, berisikan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode pengumpulan data, sistematika penulisan, dan kerangka penulisan.
- BAB II : “Dinamika hubungan pemerintah Cina dengan muslim Uighur di Xinjiang pra tragedi WTC”. Berisikan tentang sejarah perkembangan Islam di Cina, membahas sejarah Islam di Cina dan sejarah muslim Uighur di Cina, keadaan geografi, seni dan budaya, dan kondisi ekonomi. Dinamika hubungan pemerintah Cina terhadap muslim Uighur di Xinjiang pra tragedi WTC.
- BAB III : “Sikap semakin represif pemerintah Cina terhadap muslim Uighur di Xinjiang paska tragedi WTC”. Berisikan Isu terorisme secara global pasca tragedi WTC, dan sikap semakin represif pemerintah Cina terhadap muslim Uighur di Xinjiang paska tragedi WTC.
- BAB IV : “Kekhawatiran pemerintah cina terhadap muslim uighur di xinjiang paska tragedi WTC” Berisikan pelabelan kepada kelompok muslim Uighur di Xinjiang dan faktor ekonomi dan keamanan.
- BAB V : “Kesimpulan”. Bagian ini berisikan rangkuman dari bab-bab sebelumnya dan merupakan penutup dari penulisan skripsi ini